

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan..

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah

dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

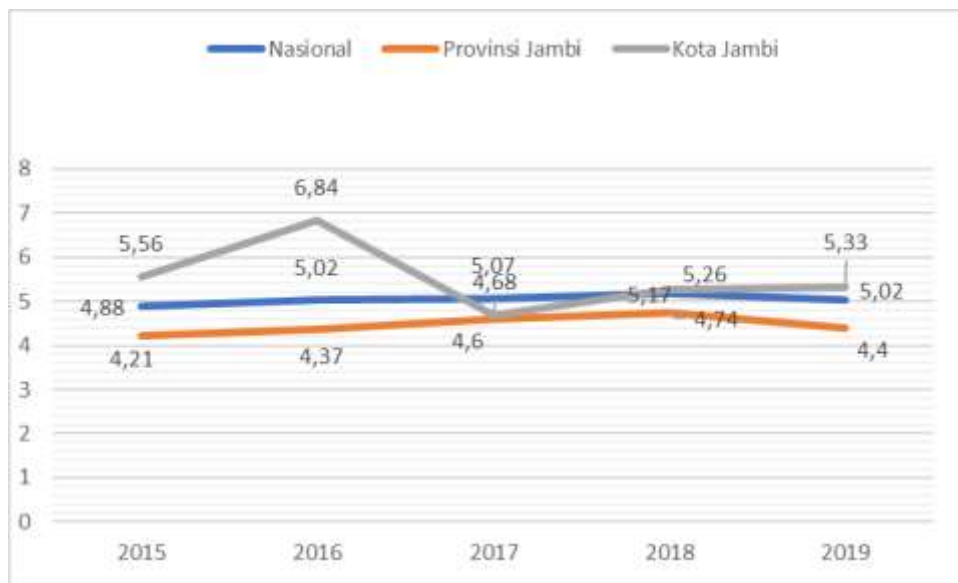
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2015-2019, LPE Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali tahun 2017. LPE tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi, hal

ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2019, LPE Kota Jambi meningkat menjadi 5.33% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,4 % dan LPE Nasional yang sebesar 5,02 %. Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perekonomian di Kota Jambi pada Tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat dan meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jambi (berdasarkan harga konstan 2010). Kondisi ini menggambarkan kondisi sektor riil di Kota Jambil yang lebih kondusif, sehingga terjadi peningkatan investasi. Dilihat dari sisi permintaan, semua komponen permintaan akhir meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan (*equity* dan *sustainable growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara dengan pemanfaatan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 2015-2019 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dari

Grafik 3.1 pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 6,84 persen, kemudian menurun drastis pada tahun 2017 adalah sebesar 4,68 persen. Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat sebesar 5,26 persen dan terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga Tahun 2019 mencapai angka 5.33 persen dan merupakan pertumbuhan yang tertinggi selama periode analisis. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada Tahun 2017, yakni karena masih lemahnya ekonomi global, dan juga erat kaitannya dengan penurunan sektor perdagangan besar sebagai sektor utama Kota Jambi.

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	180.64	183.86	187.68	195.98	190.88
B. Pertambangan dan Penggalian	526.09	509	418.28	432.13	425.97
C. Industri Pengolahan	1962.94	2045.89	2124.29	2200.32	2272.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	29.45	31.18	31.73	33.65	35.61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.27	42.99	43.96	46.13	46.5
F. Konstruksi	1516.11	1578.66	1703.57	1809.48	1943.29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4219.92	4544.46	4784.48	5120.19	5505.78
H. Transportasi dan Pergudangan	1995.12	2242.84	2398.29	2481.6	2530.3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.23	379.07	415.17	447.02	476.26
J. Informasi dan Komunikasi	776.3	843.49	900.36	974.85	1037.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	936.67	1050.08	1085.94	1079.09	1104.82
L. Real Estate	402.01	421.73	444.99	474.67	510.07
M,N. Jasa Perusahaan	446.93	476.18	504.52	531.25	558.9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1215.55	1251.81	1282.75	1341.77	1402.2
P. Jasa Pendidikan	725.6	771.53	805.6	858.39	924.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.89	430.57	457.5	486.04	534.36
R,S,T,U. Jasa lainnya	125.23	133.1	139.24	148.78	155.35
Produk Domestik Regional Bruto	15851.95	16936.44	17728.34	18661.33	19655.79

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5505,78 Miliar; (b), sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2530,3 Miliar; (c), sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2272,93 Miliar; (d), sektor Konstruksi sebesar Rp. 1943,29 Miliar; dan (e), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1402.2 Miliar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.58	1.78	2.08	4,42	-2,61
B. Pertambangan dan Penggalian	-31,34	-3.25	-17.82	3.31	-1,43
C. Industri Pengolahan	5.17	4.23	3.83	3,58	3,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.55	5.87	1.76	6.05	5,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.97	4.17	2.25	4.94	0,8
F. Konstruksi	2.5	4.13	7.91	6.22	7,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.13	7.69	5.28	7.02	7,53
H. Transportasi dan Pergudangan	5.7	12.42	6.93	3,47	1,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.1	8.24	9.52	7.67	6,54
J. Informasi dan Komunikasi	9.36	8.65	6.74	8.27	6,45
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.85	12.11	3.42	-0.63	2,38
L. Real Estate	2.43	4.9	5.52	6.67	7,46
M,N. Jasa Perusahaan	6.82	6.54	5.95	5.3	5,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.42	2.98	2.47	4.6	4,5
P. Jasa Pendidikan	7.64	6.33	4.42	6.55	7,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.28	7.14	6.25	6.24	9,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.99	6.28	4.62	6.85	4,41
Produk Domestik Regional Bruto	5,12	6,84	4,68	5,26	5,33

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	285.98	310.93	318.35	342.17	341.08
B. Pertambangan dan Penggalian	541.71	519.83	406.74	579.55	548.01
C. Industri Pengolahan	2467.77	2655.3	2830.67	2981.19	3112.5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38.21	47.92	55.56	61.12	66.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.36	62.06	66.78	71.41	83.91
F. Konstruksi	1929.78	2090.38	2308.87	2554.04	2801.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5999.14	7233.21	7952.23	8896.46	9712.78
H. Transportasi dan Pergudangan	2535.82	3072.6	3329.32	3570.37	3707.78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.23	558.39	631.99	682.67	735.07
J. Informasi dan Komunikasi	941.74	1115.13	1205.59	1333.28	1436.66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1251.24	1465.86	1536.12	1582.39	1646.67
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2019 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu

pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

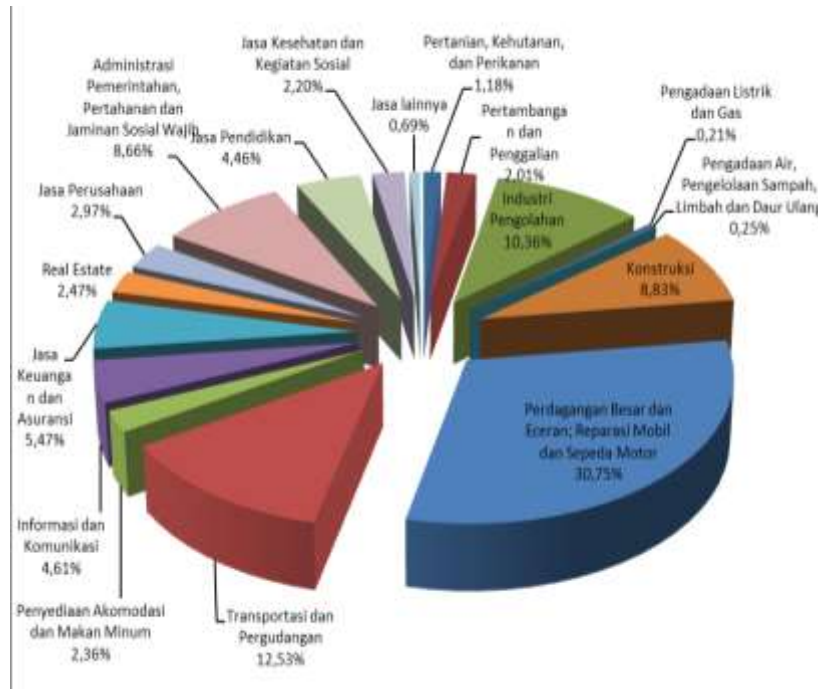
Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11
B Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78
C Industri Pengolahan	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27
F Konstruksi	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48
H Transportasi dan Pergudangan	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,57	4,59	4,62	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34
L Real Estate	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55
M Jasa Perusahaan	2,97	2,99	3,01	2,98	3,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,49	8,82	8,61	8,68	8,53
P Jasa Pendidikan	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28
R Jasa Lainnya	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	97,94	98,21	98,52	98,05	98,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,48%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,02%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,09%; sektor Konstruksi sebesar 9,08%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,53%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2019 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2

Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2019

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	13.123,57	14.212,68	15.432,10	16.415,75	17,613,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12,072,05
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	61,63	58,24	58,69	56,88	57,08
2.	Atas Dasar Harga Konstan	63,54	62,16	62,45	61,54	61,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan

tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 13.123.57 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 17.613.64 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Tabel 3.6
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5.000,77	5.154,58	5,739,32	6,165,09	6,626,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.424,91	3.394,85	3,676,52	3,915,40	4,210,23
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	23,49	21,12	21,83	21,36	21,48
2.	Atas Dasar Harga Konstan	21,61	20,04	20,74	20,98	21,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.000.77 juta rupiah (2016); 5.154.58 juta rupiah (2017); dan 5.739.32 juta rupiah (2018); 6.165.09 juta rupiah serta (2019) sebesar 6.626.44 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.7, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.123.10 Juta pada tahun 2015 dan terus

meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 6.855.91 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.7
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5,123,10	5,447,32	5,853,90	6,292,62	6,855,91
2	Atas Dasar Harga Konstan	4,014,60	4,179,20	4,383,19	4,522,82	4,777,22
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24,06	22,32	22,26	21,80	22,22
2	Atas Dasar Harga Konstan	25,33	24,68	24,72	24,24	24,30

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai 51.024 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp 44.479 juta dan Rp 48.369 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.8.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	36.963	41.827	44.479	48.369	51.024
2	Atas Dasar Harga Konstan	27.518	29.026	29.990	31.201	32.503
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,66	5,48	3,32	4,25	4,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal administered price terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listri. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok volatile food

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3,6
Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02% dan 1,27 % pada tahun 2019 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

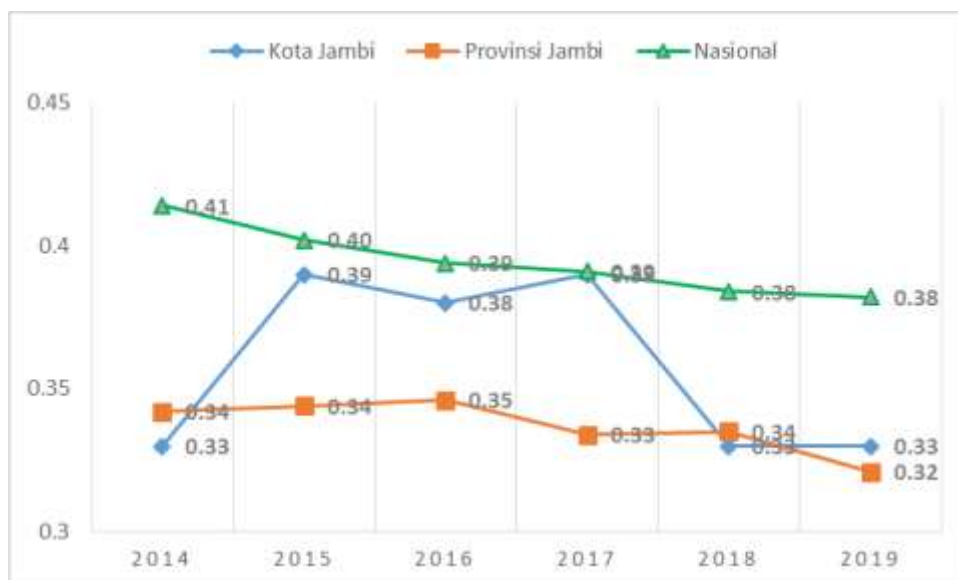
Jika melihat inflasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

3.1.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2019 mencapai sebesar 0,33 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,39 atau 0,06 poin. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan

masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,31.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Gambar 3.3.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi
Tahun 2014-2019

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2029 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

3.1.2.1. Pandemi Covid 19 dan Ekonomi Kota Jambi

Diawali pada awal tahun 2020 terjadi perubahan dahsyat ekonomi dunia akibat dari **Pendemi Covid 19 atau Virus Corona**, yang dimulai dari negara China berhembus ke semua negara di dunia (Negara Eropa, Amerika, Asia) termasuk Indonesia, yang pada akhirnya berimbas negatif kepada semua Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk kepada Kota Jambi. Virus Corona merupakan persoalan kesehatan yang sudah menyebabkan kematian kepada banyak manusia di dunia dan Indonesia. Kebijakan pemerintah malukan pembatasan gerakan sosial

dan sentuhan secara fisik, bahkan banyak negara melakukan “lock down” untuk menutup akses virus corona tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik (*social and physical distancing*) bahkan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), meskipun tidak untuk semua wilayah telah menimbulkan dampak negatif kepada berhentinya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terus berimbas kepada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Namun hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan negatif pada tahun 2020. Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh dibawah 2 persen.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Kota Jambi Tahun 2020 dan 2021

Kota Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi terkait erat dengan kondisi ekonomi eksternal (dunia, Indonesia dan Provinsi Jambi) karena perekonomian Kota Jambi termasuk ekonomi terbuka (*open economy*), sehingga fluktuasi ekonomi dunia dan Indonesia mempengaruhi fluktuasi perkembangan ekonomi Kota Jambi. Penurunan pertumbuhan ekonomi eksternal akan menurunkan permintaan terhadap produk ekonomi Kota Jambi. Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga semua estimasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya (asumsi kondisi normal harus berubah), ada dua skenario target pertumbuhan ekonomi Kota **Jambi tahun 2020** yaitu :

1. Skenario optimis, artinya Virus Corona yang terjadi pada kuartalan pertama (Q1) tahun 2020 bisa diatas dan dampak negatif terhadap masyarakat menurun pada kuartalan kedua (Q2), dan terus terjadi pada kuartalan ketiga (Q3), bahkan dapat hilang pada kuartalan ke empat (Q4), maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi terkoreksi, namun di estimasi masih mampu tumbuh mencapai **sekitar 3.5 sampai 4.5 persen**. Hal ini disebabkan : (a), pada periode lima tahun sebelumnya relatif tinggi (2015-2019) bahkan tahun tahun 2019 mampu mencapai 5.33 persen; dan (b), Kota Jambi tidak termasuk **zona merah** dan dikategorikan dalam **wilayah kebijakan PSBB**, sehingga aktivitas ekonomi masih tetap jalan terutama untuk sektor-sektor unggulan (sektor

perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas; serta industri pengolahan) bahkan terjadi kenaikan untuk jasa sektor Jasa dan Komunikasi. Kemudian ditopang oleh masih berjalannya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai penggerak sektor lainnya.

2. Skenario moderat, artinya sampai akhir tahun 2020, Virus Corona tidak mampu diturunkan pada kuartalan ke dua, tiga bahkan sampai kuartalan ke empat. Pada sisi lain kebijakan ekonomi pemerintahan Kota Jambi sangat terkait dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi, tidak mampu melanggarkan kegiatan ekonomi bahkan aktivitas sektor riil masih tetap tidak berjalan dengan baik sebagaimana kondisi normal, maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi diperkirakan akan lebih kecil berikisar **antara 2 sampai 3 persen namun masih lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional**. Hal ini disebabkan (a), beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan; (b), kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan (c), semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi.

Skenario optimis pada tahun 2020 dan semakin membaik pada tahun 2021, asumsi terjadi kestabilan kesehatan masyarakat dimana Covid 19 sudah dapat diatasi dan bahkan tidak ada, maka kebijakan pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi bahkan meningkatkan daya saing daerah Kota Jambi yang semakin dinamis terutama mendorong berkembangannya sektor perdagangan barang dan jasa yang menjadi orientasi kota Jambi, demikian juga daya saing pariwisata yang unggul dan kompetitif serta mendorong sektor administrasi pemerintahan yang semakin dinamis dan inovatif sebagai lokomotif menggerakkan sektor lainnya.

Pada kondisi optimisme ekonomi akan kembali normal, **maka pada Tahun 2021** perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menjadi **sebesar 4 sampai 5 persen** dan lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional. Hal ini disebabkan bahwa secara makro kondisi perekonomian nasional diperkirakan sudah membaik seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada percepatan pengembangan daerah. Kemudian, faktor-faktor lain yang diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tersebut adalah:

1. Implementasi perdagangan bebas ASEAN (MEA) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri, peningkatan daya saing produk dan peningkatan nilai ekspor sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kota Jambi.
2. Pergeseran struktur perekonomian di Kota Jambi ke arah sektor tersier diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru sehingga akan berdampak terhadap pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas.
3. Kebijakan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan diharapkan dapat meningkatkan sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa masih merupakan penopang terbesar perekonomian Kota Jambi, namun terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan pula dapat memacu peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Meskipun tidak diharapkan kondisi yang semakin parah, namun tahun 2021 masih sulit melakukan prediksi secara pasti tentang perbaikan kondisi variabel gangguan Covid 19, apakah sudah mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat, namun terdapat optimisme bahwa Pandemi Covid 19 akan berkurang pada tahun 2021, karena semua negara bergerak menuju titik yang sama untuk menghilangkan Virus Corona tersebut karena jika berlangsung

lama, ekonomi dunia dan Indonesia akan menuju kepada resesi. Kemudian juga didukung dengan kebiasaan masyarakat secara mandiri terbiasa mengatas dampak Virus Corona tersebut secara mandiri dan akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Logika rasionalitas tersebut membuat keyakinan Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi **diatas 4 sampai 5 persen** (lebih tinggi dari tahun 2020) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan nasional.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021
(Berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2018-2028)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	397.327.847.290	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000	442.917.916.000
1.1.1	Pajak daerah	201.429.136.841	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000	270.860.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	43.077.425.944	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000	48.826.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.066.340.479	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000	10.269.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.754.944.026	74.203.426.907,38	89.201.101.152	90.916.193.000	112.962.916.000
1.2	Dana perimbangan	1.013.005.895.282	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930	1.179.293.447.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	108.336.723.678	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930	141.000.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	714.783.378.000	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000	795.344.649.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	189.885.793.604	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000	242.948.798.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.299.495.375	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000	188.287.067.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.819.000.000	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000	61.845.400.000
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.760.495.375	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000	104.430.458.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000	15.291.209.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**))	6.720.000.000	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.500.633.237.947	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930	1.810.498.430.000

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	753.881.710.930	743.865.148.930
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	721.563.236.930	721.563.236.930
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi				1.000.000.000	
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	21.553.843.619	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	4.178.512.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	100.000.000	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	759.889.727.857	795.111.216.885	753.881.710.930	743.865.148.930
2.2	Belanja Langsung	862.510.115.270	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	64.787.962.108	76.810.075.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	567.399.452.976	576.438.738.000
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	826.611.216.916	539.941.589.701
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	2.212.680.342.930	1.937.055.551.631

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	67.173.120.000	127.557.121.631
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				400.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.489.386.517	131.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	127.557.121.631
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000		0	
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	181.148.041			0	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.169.148.041	5.000.000.000		0	1.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	126.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	126.557.121.631

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2020
1	PAJAK DAERAH	201.429.136.841,40	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000
2	RETRIBUSI DAERAH	43.077.425.943,53	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.066.340.478,60	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	144.754.944.025,57	74.203.472.407,38	89.201.101.152	90.916.193.000
PAD		397.327.847.289,10	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000
5	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	108.336.723.678,00	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930
6	D A U	714.783.378.000,00	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000
7	D A K	189.885.793.604,00	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000
DANA PERIMBANGAN		1.013.005.895.282,00	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930
8	PENDAPATAN HIBAH	2.819.000.000,00	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000
9	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	80.760.495.375,60	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000
10	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000
11	BANTUAN KEUANGAN	6.720.000.000,00	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000
LAIN-LAIN PEND. DAERAH		90.299.495.375,60	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000
JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA		1.500.633.237.946,70	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2021 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik baik melalui lembaga perbankan/non perbankan.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.673.334.071.976,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2019 mencapai Rp. 393.552.656.639,79 atau 103,09% dari target penerimaan sebesar Rp. 381.743.685.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 23,83% terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 338.892.256.292,96 maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13% atau naik Rp. 54.660.774.046,83.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	203.500.000	215.444.388	105,87	242.090.000	256.027.807	105,76
2.	Ret. Daerah	44.012.000	40.389.059	91,77	45.068.647	38.540.603	85,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	8.850.000	8.854.962	100,06	9.700.000	9.783.144	100,86
4.	Lain-lain PAD yg sah	79.540.135	74.203.846	93,29	84.885.038	89.201.101	105,08
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2017 dan 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2018 dengan TA 2019 *(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)*

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	118.890.269	118.633.409	99,78	137.965.056	132.185.357	95,81
2.	Dana Alokasi Umum	714.783.378	714.783.378	100,00	757.404.051	757.404.051	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	291.823.567	277.298.116	95,02	234.950.785	220.587.624	93,89
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp. 137.965.056.000,00 realisasinya mencapai Rp. 132.185.357.673,00 atau 95,81%.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2019 adalah sebesar Rp. 757.404.051.000,00 dan realisasinya mencapai Rp. 757.404.051.000,00 atau 100,00%, sedangkan pada penerimaan dari pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,89% yaitu Rp. 220.587.624.658,00.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2019, ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 81.347.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.911.044.081,07 (141,26%). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp. 61.479.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.918.148.000,00 (19,39%).

Untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dengan Tahun 2019 di bawah ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	62.534.000	35.914.102	57,43	61.479.800	11.918.148	19,39
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.347.485	92.499.055	113,71	81.347.485	114.911.044	141,26
4.	Dana Penyesuaian Otsus	18.000.000	18.000.000	100,00	11.291.209	11.291.209	100,00
5.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	5.220.000	3.720.000	71,26	9.720.000	9.720.000	100,00
TOTAL		95.684.861	167.101.485	89,85	163.838.494	147.840.401	90,24

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga tehnis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.

- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 2.212.680.342.930,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.458.798.632.000,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 753.881.710.930,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 1.846.258.216.875,00 maka tahun 2020 belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan.

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan target tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021, Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	614.857.160.444	780.513.273.241	721.563.236.930	721.563.236.930
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	1.000.000.000	
2.1.4	Belanja hibah	36.588.195.224	14.726.000.000	21.553.843.619	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	4.178.512.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.292.132.400	1.307.132.400	100.000.000	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	657.258.424.968	806.303.727.641	753.881.710.930	743.865.148.930
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	59.749.332.455,00	66.138.355.995	64.787.962.108	76.810.075.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	415.787.045.628,24	523.039.125.378	567.399.452.976	576.438.738.000
2.2.3	Belanja modal	445.809.162.048,96	450.777.007.861	826.611.216.916	539.941.589.701
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	921.345.540.132,20	1.039.954.489.234	1.458.798.632.000	1.193.190.402.701
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.578.603.965.100	1.846.258.216.875	2.212.680.342.930	1.937.055.551.631

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan rencana Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Sedangkan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah.

Selama tahun 2017 dan 2018 pembiayaan di Kota Jambi untuk realisasi penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp. 134.489.386.517,00 dan Rp 131.650.797.287,90. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.169.148.041 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	131.650.797.287,90	172.924.144.899	67.173.120.000	127.557.121.631
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	400.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN	131.650.797.287,90	172.924.144.899	467.173.120.000	127.557.121.631

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBIAYAAN				
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.000.000.000	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	0	0	1.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	172.924.144.899	467.173.120.000	126.557.121.631

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD tahun anggaran 2020, pembiayaan netto ditargetkan Rp. 467.173.120.000, sedangkan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 126.650.797.287.